

SKRIPSI

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERKAIT
PENOMORAN RUMAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

(Studi Kasus Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat)



Diajukan oleh:

MUHAMMAD FACHRURROZY EZA ANLY

NIM. 2110211210199

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

SKRIPSI

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERKAIT
PENOMORAN RUMAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

(Studi Kasus Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat)



Diajukan oleh:

MUHAMMAD FACHRURROZY EZA ANLY

NIM. 2110211210199

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERKAIT PENOMORAN
RUMAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

(Studi Kasus Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

MUHAMMAD FACHRURROZY EZA ANLY
NIM. 2110211210199

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

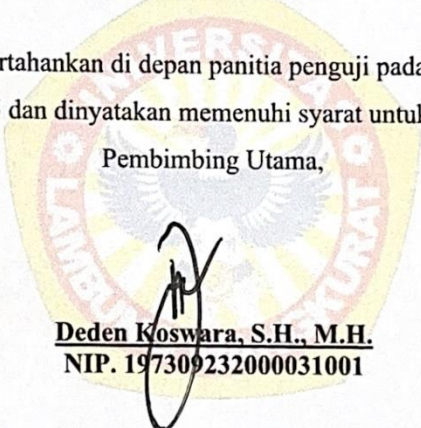
**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TERKAIT PENOMORAN RUMAH DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**
(Studi Kasus Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat)

Diajukan oleh

MUHAMMAD FACHRURROZY EZA ANLY
NIM. 2110211210199

Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia penguji pada hari rabu tanggal 28
Mei 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Deden Koswara, S.H., M.H.
NIP. 197309232000031001

Diketahui
Ketua Program Studi
Program Studi Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TERKAIT PENOMORAN RUMAH DI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**
(Studi Kasus Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat)

Diajukan oleh

MUHAMMAD FACHRURROZY EZA ANLY
NIM. 2110211210199

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 343 / UN8.1.11 / SP / 2025
Tanggal : 09 JUL 2025



Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Rabu tanggal 28 Mei 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Sekretaris : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 508/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 23 Mei 2025.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Fachrurrozy Eza Anly
NIM : 2110211210199
Tempat/Tgl.Lahir : Tuban, 30 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERKAIT PENOMORAN RUMAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Fachrurrozy Eza Anly

NIM. 2110211210199

MOTO

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."
(Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian mereka.)
– **Eleanor Roosevelt**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas limpahan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya sehingga karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, karya ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih dalam hidup saya:

Papah dan Mama tercinta

Sebagai wujud bakti, cinta, dan hormat yang tiada terhingga, kupersembahkan karya ini untuk Papah dan Mama tercinta **Hadli dan Unik Ernawati**. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, serta segala pengorbanan, peluh, dan air mata yang telah tumpah sejak aku kecil hingga saat ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, memberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta keberkahan dunia dan akhirat. Doa dan restu kalian adalah kekuatan terbesar dalam langkah hidupku. Semoga kelulusan ini menjadi awal dari banyak kebahagiaan yang bisa aku persembahkan untuk kalian.

Adik-adikku tersayang

Terima kasih untuk **Ahmad Fawwaz Raissa Anly, Aaleyah Putri Anly, dan Muhammad Zavier Junio Anly**. Kehadiran, semangat, dan canda tawa kalian adalah pelipur lara di setiap lelakku. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk meraih cita-cita dan selalu saling mendukung dalam suka maupun duka. Semoga kebahagiaan ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang cerah untuk kita semua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.**, atas segala bimbingan, nasihat, dan kesabarannya selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah membimbing dengan penuh ketelitian, ketulusan, dan dorongan positif yang tak ternilai, mulai dari tahap awal hingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala ilmu, waktu, dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang senantiasa mengalir.

RINGKASAN

Muhammad Fachrurrozy Eza Anly, April 2025. **URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERKAIT PENOMORAN RUMAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 Halaman. Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas mengenai regulasi penomoran rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang masih menghadapi berbagai tantangan terkait implementasi sistem administrasi alamat yang terorganisir. Penomoran rumah adalah bagian integral dari administrasi kependudukan dan tata kelola wilayah yang efektif. Dalam perspektif hukum tata negara dan administrasi publik, penomoran rumah bukan hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hak-hak warga negara dalam memperoleh pelayanan publik yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, penomoran rumah memerlukan dasar hukum yang kuat di tingkat nasional dan daerah yang mencakup penataan ruang, pelayanan publik, serta administrasi kependudukan. Penomoran rumah juga berperan penting dalam pembangunan sosial ekonomi, karena dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan publik dan ketertiban administrasi di wilayah tersebut. Penomoran rumah di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan wajib pelayanan dasar, termasuk administrasi kependudukan yang mencakup sistem alamat yang teratur, termasuk penomoran rumah. Tanpa penomoran rumah yang teratur, pelayanan publik akan terhambat, dan pencapaian tujuan otonomi daerah dalam aspek administratif serta pembangunan sosial ekonomi masyarakat bisa terpengaruh. Selain itu, Permendagri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan dan Penomoran Rumah memberikan petunjuk teknis bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem penomoran rumah yang terstandarisasi. Regulasi ini menciptakan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan sistem penomoran rumah yang sistematis dan akuntabel, mendukung efisiensi pelayanan publik baik untuk administrasi maupun darurat. Namun, meskipun sistem penomoran rumah di Kotawaringin Barat memiliki dasar hukum yang kuat, implementasinya menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur penomoran rumah. Tanpa adanya Perda yang jelas dan terperinci, pelaksanaan penomoran rumah di daerah ini sering kali tidak terstandarisasi, bergantung pada inisiatif masing-masing pihak seperti RT, perangkat desa, atau pengembang perumahan. Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa dan kecamatan, penomoran rumah di Kotawaringin Barat dilakukan secara sporadis tanpa panduan yang jelas mengenai format, ukuran, dan penempatan papan nomor rumah. Bahkan, banyak rumah baru yang dibangun tanpa nomor rumah, sementara masih ada lahan kosong, memperburuk ketidakteraturan ini. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang menghambat penataan administrasi dan pelayanan publik yang lebih terstruktur dan efisien. Kondisi ini sangat berbeda dengan daerah lain seperti Surabaya dan Yogyakarta, yang sudah

memiliki Perda mengenai penomoran rumah. Di Surabaya, misalnya, Perda No. 1 Tahun 2012 mengatur secara rinci kewajiban setiap rumah untuk memiliki nomor, termasuk ketentuan mengenai bentuk papan nomor dan sanksi bagi yang tidak mematuhi. Penerapan Perda semacam ini membantu menciptakan sistem pelayanan publik yang berbasis data akurat dan dapat diandalkan, serta memudahkan integrasi layanan seperti pos, darurat, dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk segera merumuskan Perda yang mengatur penomoran rumah dengan rinci dan komprehensif, mencakup aspek administrasi, teknis, dan partisipasi masyarakat dalam implementasinya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menerapkan sistem penomoran rumah yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, pemerintah daerah diberi hak untuk menetapkan Perda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Perda ini akan memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan sistem penomoran rumah dan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, pelayanan publik, serta penataan wilayah yang lebih terstruktur. Penomoran rumah yang terorganisir mempermudah proses identifikasi penduduk, pengiriman surat, layanan darurat, dan berbagai urusan administratif lainnya. Implementasi regulasi penomoran rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat masih menghadapi hambatan besar. Keterbatasan anggaran daerah adalah hambatan utama dalam pembentukan dan penerapan sistem penomoran rumah yang efisien. Pembentukan Perda, pengadaan papan nomor rumah, dan pelatihan aparat desa dan kecamatan memerlukan anggaran yang cukup besar. Selain itu, koordinasi yang buruk antar dinas seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Pekerjaan Umum menghambat pelaksanaan yang optimal. Ketidaksiapan dalam peran dan tanggung jawab masing-masing dinas menyebabkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan penomoran rumah. Di luar faktor internal pemerintah daerah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penomoran rumah yang tertib juga menjadi kendala. Masyarakat yang belum menyadari pentingnya penomoran rumah sebagai kewajiban administratif sering kali tidak mendukung kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan melibatkan tokoh lokal dalam penyuluhan agar masyarakat lebih memahami pentingnya penomoran rumah yang teratur.

Peran serta masyarakat, terutama tokoh lokal dan aparat desa/kelurahan serta RT/RW, sangat penting dalam mendukung implementasi sistem penomoran rumah yang tertib. Tokoh masyarakat yang dihormati dapat menjadi agen perubahan untuk meningkatkan kesadaran warga mengenai kewajiban administratif ini. Keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan akan membantu menciptakan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aparat desa/kelurahan dan RT/RW, sebagai ujung tombak kebijakan publik, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap rumah mendapatkan nomor yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Mereka juga bertugas untuk memverifikasi data rumah tangga dan memastikan nomor rumah yang diberikan sesuai dengan peta wilayah yang ada. Dengan adanya Perda yang jelas, dukungan anggaran yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat dan aparat pemerintahan di tingkat desa, sistem penomoran rumah yang teratur dapat diwujudkan. Hal ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketertiban administrasi di daerah tersebut, serta mendukung pembangunan sosial ekonomi yang lebih efisien dan merata.



ABSTRAK

Muhammad Fachrurrozy Eza Anly, April 2025. **URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERKAIT PENOMORAN RUMAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 Halaman. Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembentukan peraturan daerah yang mengatur penomoran rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya di Kecamatan Arut Selatan. Penomoran rumah adalah aspek penting dalam administrasi kependudukan dan pelayanan publik yang terstruktur. Namun, di Kabupaten ini, penomoran rumah masih dilakukan secara sporadis, tanpa peraturan yang jelas dan terstandarisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melibatkan wawancara dengan perangkat desa, kecamatan, serta masyarakat untuk menggali masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakteraturan penomoran rumah berpengaruh negatif terhadap pelayanan publik, administrasi pemerintahan, serta respons darurat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur penomoran rumah, sehingga menyebabkan kesulitan dalam penataan wilayah dan pengelolaan administrasi yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan Perda untuk menetapkan sistem penomoran rumah yang jelas, sistematis, dan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta tata kelola administrasi yang lebih baik. Dengan adanya Perda, diharapkan dapat mempercepat pembangunan sosial ekonomi serta meningkatkan ketertiban administratif di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kata Kunci: Penomoran Rumah, Peraturan Daerah, Administrasi Kependudukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Penomoran Rumah Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Studi Kasus Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat)”. Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Hadli dan Unik Ernawati, yang telah menjadi motivasi terbesar dan sumber semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Doa, dukungan, dan kasih sayang kalian adalah kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, 28 Mei 2025

Peneliti



Muhammad Fachrurrozy Eza Anly

NIM. 2110211210199

DAFTAR ISI

	Hlmn
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Keaslian Penelitian	3
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Otonomi Daerah.....	8
B. Pemerintah Kabupaten/Kota.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Sifat Penelitian.....	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Regulasi Penomoran Rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat Saat Ini ...	25

B. Pengaruh Masalah Sosial Masyarakat terhadap Tidak Adanya Pengaturan Penomoran Rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat	35
BAB V PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Pemberian Nomor Pada Pekarangan, Rumah dan bangunan Serta Papan nama Dalam Kotapraja Administratif Palangka Raya

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah